

TANTANGAN GURU REGULER DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF : STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR

Azmi Ghasani¹, Zoni Sulaiman², Dani Gunawan³
^{1,2,3}PGSD FPISBS Institut Pendidikan Indonesia Garut
¹azmighasan3@gmail.com, ²zoni@institutpendidikan.ac.id,
³danistkip@gmail.com

ABSTRACT

Inclusive education is the main pillar in providing equal access to education, but in practice, regular teachers are often the ones most affected by various implementation obstacles. This research aims to describe in depth the challenges faced by regular teachers in implementing inclusive education at SDN Regol 6. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interview techniques with first grade teachers and analyzed using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions to obtain a holistic picture. The research results show that regular teachers at SDN Regol 6 face serious challenges that are multidimensional. First, the absence of Special Guidance Teachers (GPK) forces regular teachers to carry a double burden, where they have to carry out the role of main educators as well as special assistants for Students with Special Needs (PDBK). This condition causes an imbalance in learning focus, where regular students are often neglected in order to handle the intensive needs of GDPK. Second, the low level of special pedagogical competence due to the lack of formal training forces teachers to carry out independent digital literacy which is not necessarily comprehensive. Third, limited physical facilities, such as the absence of disabled toilets, ramp access, and special learning media, become physical obstacles for teachers in creating independent learning for students. Fourth, teachers face significant psychological and emotional pressure due to communication barriers with students' parents who tend not to accept their children's special needs. This rejection from the family hampers educational synergy and increases the mental burden on class teachers. This research concludes that the challenges faced by regular teachers are not just administrative technical, but touch managerial and emotional aspects that require systemic support in the form of providing experts, improving infrastructure, and continuing education for students' parents.

Keyword: *Inclusive Education, Challenges for Regular Teachers, Children with Special Needs, Elementary School.*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan pilar utama dalam memberikan akses pendidikan yang setara, namun dalam praktiknya, guru reguler sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh berbagai hambatan implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh guru reguler dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di SDN Regol 6. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan guru kelas satu dan dianalisis menggunakan

metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru reguler di SDN Regol 6 menghadapi tantangan berat yang bersifat multidimensional. Pertama, ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) memaksa guru reguler memikul beban ganda (*double burden*), di mana mereka harus menjalankan peran sebagai pendidik utama sekaligus pendamping khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan fokus pembelajaran, di mana siswa reguler sering kali terabaikan demi menangani kebutuhan intensif PDBK. Kedua, rendahnya kompetensi pedagogi khusus akibat minimnya pelatihan formal memaksa guru melakukan literasi mandiri secara digital yang belum tentu komprehensif. Ketiga, keterbatasan fasilitas fisik seperti tidak adanya toilet difabel, akses *ramp*, serta media pembelajaran khusus, menjadi hambatan fisik bagi guru dalam menciptakan kemandirian belajar bagi siswa. Keempat, guru menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang signifikan akibat hambatan komunikasi dengan orang tua siswa yang cenderung tidak menerima kondisi kebutuhan khusus anaknya. Penolakan dari pihak keluarga ini menghambat sinergi pendidikan dan menambah beban mental bagi guru kelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru reguler bukan hanya sekadar teknis administratif, melainkan menyentuh aspek manajerial dan emosional yang memerlukan dukungan sistemik berupa penyediaan tenaga ahli, perbaikan infrastruktur, serta edukasi berkelanjutan bagi orang tua siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Tantangan Guru Reguler, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Dasar.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam lingkungan pendidikan reguler. Konsep tersebut berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung keberagaman siswa, tanpa diskriminasi, sebagaimana dikatakan oleh Saputro et al. (2021).

Menurut Sapon-Shevin (2007), pendidikan inklusi bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berbagai

keanekaragaman dan memenuhi kebutuhan semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Di sisi lain, Ainscow (2005) menegaskan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya ditujukan untuk siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk mengubah sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan siswa.

Pendidikan inklusi diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, di sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan tingkat awal yang memiliki peran penting dalam

perkembangan anak. Dengan memberikan keempatan yang seluas-luasnya kepada mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia sudah diatur dalam sejumlah kebijakan nasional yang bertujuan menyediakan dasar hukum dan panduan dalam penerapannya. Salah satu landasan hukum yang mengatur pendidikan inklusi adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, berhak menerima pendidikan yang sesuai.

Di samping itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif juga diterbitkan untuk memberikan panduan yang lebih rinci tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak,

baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak, dapat bersekolah bersama dalam satu lingkungan yang bersifat inklusif. Selain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan inklusif juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menyatakan bahwa: Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik dengan kelainan serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik lainnya.

Dua dekade setelah kebijakan pendidikan inklusi diperkenalkan secara nasional, Indonesia terus berupaya memperkuat pelaksanaannya di seluruh jenjang pendidikan. Meski telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal akses dan regulasi, berbagai tantangan masih menghambat

tercapainya pendidikan yang benar-benar inklusif bagi semua peserta didik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menilai bahwa pendidikan inklusi merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang setara.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, jumlah sekolah penyelenggara inklusi terus meningkat. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, terdapat lebih dari 35.000 sekolah yang telah menerapkan sistem inklusi, tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Angka ini meningkat pesat dibanding satu dekade sebelumnya, yang hanya berkisar di bawah 10.000 sekolah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat maupun daerah dalam memperluas akses pendidikan

bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, dari sisi kualitas pelaksanaan, masih ditemukan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek menyebutkan bahwa sebagian sekolah inklusi masih menghadapi kendala di lapangan yang cukup besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pendidik khusus. Hingga kini, jumlah guru pembimbing khusus masih jauh dari kebutuhan. Banyak sekolah reguler yang belum memiliki GPK, sehingga guru kelas harus berperan ganda dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus tanpa pelatihan yang memadai.

Selain itu, masalah fasilitas juga menjadi hambatan. Tidak semua sekolah memiliki sarana ramah disabilitas, seperti jalur kursi roda, toilet aksesibel, atau media pembelajaran yang disesuaikan seperti buku Braille dan perangkat audio, permasalahan tersebut berdampak pada aksesibilitas peserta didik belum sepenuhnya terjamin (Ummah et al., 2023.)

Di beberapa wilayah terpencil, keterbatasan anggaran membuat penerapan pendidikan inklusi berjalan lambat. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah stigma sosial. Meskipun kesadaran masyarakat mulai meningkat, sebagian orang tua masih enggan menyekolahkan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah umum karena khawatir anaknya tidak diterima atau tidak mampu mengikuti pelajaran. Di sisi lain, sebagian guru masih menganggap pendidikan inklusi menambah beban kerja karena memerlukan penyesuaian dalam metode mengajar. Selain itu, banyak sekolah yang tidak memiliki program pendukung yang memadai untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Marlina dan Susanti (2021) menyatakan bahwa keterbatasan ini memperburuk kualitas pendidikan inklusi yang seharusnya dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi ABK. Pemahaman guru terhadap karakteristik dan kebutuhan khusus ABK menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Guru yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan inklusi mampu memberikan perhatian lebih kepada

ABK, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara signifikan.

Pengetahuan dan pemahaman guru terhadap karakteristik anak berkebutuhan khusus adalah faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Kesiapan serta kompetensi pedagogi dan profesional guru dalam mengenali serta merespon keberagaman kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus akan berdampak langsung pada capaian hasil belajar dan adaptasi sosial emosional anak berkebutuhan khusus di kelas.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusi ini tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga melibatkan aspek sosial-emosional. Banyak siswa yang teridentifikasi sebagai peserta didik berkebutuhan khusus yang sulit berinteraksi dengan teman sekelas mereka. Hal tersebut mengharuskan guru memainkan peran sebagai fasilitator agar dapat membangun kelas yang menyenangkan, hangat, dan ramah anak terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Wulandari (2023) menjelaskan bahwa kemampuan guru untuk menciptakan

lingkungan sosial yang ramah dan terbuka bagi ABK sangat penting untuk perkembangan mereka, baik secara emosional maupun sosial. Karena lingkungan yang kondusif dan menyenangkan tersebut akan membantu PDBK merasa aman, diterima, dan dihargai sehingga mereka akan lebih percaya diri untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di SDN Regol 6. Penelitian ini akan memberikan gambaran nyata tentang praktik pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Dengan menggali pengalaman langsung dari para guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan dan program pendidikan inklusi yang lebih baik di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh. Menurut Moleong (2019:6)

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bersumber dari objek yang diamati selama penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam yang dilakukan kepada guru kelas 1. Wawancara dilakukan secara terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan yang telah dirancang dengan cermat untuk memastikan semua aspek penting terkait tantangan pembelajaran ABK dapat tergalikan secara komprehensif. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya mendapatkan informasi yang kaya dan detail mengenai pengalaman, pandangan, strategi, serta kendala yang dihadapi guru dalam implementasi pendidikan inklusif dan memfasilitasi proses belajar mengajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah dasar.

Setelah seluruh data terkumpul dari wawancara yang dilakukan, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data tersebut diantaranya yaitu memilih, memfokuskan dan merangkum data mentah menjadi bentuk yang lebih

ringkas dan bermakna agar mudah dipahami serta mempermudah analisis lebih lanjut kemudian penyajian informasi data yang telah terpilah dan tersusun serta menarik kesimpulan untuk lebih memahami makna dari apa yang telah diteliti. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci dan holistik mengenai beragam tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif khususnya di tingkat sekolah dasar, sekaligus menjadi landasan untuk rekomendasi yang relevan di masa mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pendidikan inklusif di SDN 6 Regol ini memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis serta kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada semua pihak di sekolah seperti guru, siswa dan orang tua. Berdasarkan hasil identifikasi, di SDN 6 Regol ini terdapat empat PDBK dengan identifikasi kebutuhan yang berbeda yaitu satu orang siswa dengan ADHD & Autism dan tiga orang siswa lainnya dengan penyakit bawaan dan *learning disability* . Untuk menentukan jenis dan klasifikasi siswa berkebutuhan

khusus tersebut, SDN 6 Regol ini melakukan identifikasi dan asesmen khusus pada saat PPDB serta berkolaborasi dengan pihak psikologi agar data yang diperoleh oleh sekolah sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak psikologi.

Walaupun sudah memiliki kebijakan yang jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan. Di SDN 6 Regol ini tidak terdapat Guru pendamping khusus (GPK) untuk PDBK, sehingga guru kelas harus berperan ganda sebagai pendidik utama sekaligus pendamping khusus. Hal tersebut menjadi beban bagi beberapa guru karena selain mendampingi mereka juga harus membuat PPI (Program Pembelajaran Individual) sendiri tanpa latar belakang pendidikan luar biasa. Mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan membagi fokus antara siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus. Dampaknya siswa reguler seringkali terabaikan karena guru cenderung fokus kepada siswa yang berkebutuhan khusus.

Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya pelatihan khusus yang berkelanjutan tentang pendidikan inklusif sehingga guru di SDN 6 Regol ini hanya mencari pemahaman sendiri

tentang pendidikan inklusif lewat internet karena mereka sebagai guru harus bertanggung jawab atas siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah.

Permasalahan di atas diperparah dengan fasilitas yang kurang memadai. Di SDN 6 Regol ini tidak terdapat toilet difabel dan akses ramp serta dalam pembelajaran di dalam kelas juga tidak dilengkapi dengan peralatan dan bahan belajar yang sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus. Guru terhambat dalam mengajar karena fasilitas fisik sekolah tidak mendukung kemandirian belajar siswa sehingga menyebabkan perkembangan belajar mereka menjadi lambat.

Dalam proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus, guru di SDN 6 Regol ini melibatkan orang tua untuk ikut serta dalam proses Pendidikan. Namun orang tua dari siswa berkebutuhan khusus yang ada di SDN 6 Regol ini hanya menemani anaknya pada saat pertama kali masuk sekolah saja (PPDB) dan tidak berkelanjutan dalam menemani proses pembelajaran anaknya sehingga orang tua tersebut tidak mengetahui bagaimana perilaku anaknya saat disekolah. Kemudian

pada saat guru memberitahukan kepada orang tua tentang perilaku anaknya di sekolah, orang tua tersebut tidak percaya dan tidak menerima apa yang diberitahukan oleh guru tentang perilaku buruk anaknya, sehingga orang tua tersebut tidak mau datang saat guru mengundangnya ke sekolah untuk berdiskusi. Hal tersebut membuat guru menghadapi tekanan emosional saat menghadapi penolakan orang tua atau perilaku PDBK yang tidak terprediksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, komunikasi antara guru dan orang tua yang pada awalnya sangat baik menjadi kurang baik. Komunikasi antara guru dan orang tua PDBK yang buruk juga menjadi tantangan bagi guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.

Semua permasalahan di atas dapat dikatakan sebagai problematika dan tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif karena secara langsung menghambat pencapaian tujuan pendidikan inklusif.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru

reguler dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN Regol 6 bersifat multidimensional dan memberikan tekanan yang signifikan terhadap peran pendidik. Ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi tantangan utama yang memaksa guru kelas memikul beban ganda, yakni sebagai pengajar reguler sekaligus pendamping khusus yang harus menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) tanpa latar belakang keahlian yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kompetensi pedagogi khusus akibat minimnya pelatihan berkelanjutan, sehingga guru harus mengandalkan literasi mandiri secara digital yang belum tentu akurat. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana yang tidak aksesibel menambah beban fisik guru dalam membantu mobilitas siswa PDBK serta menghambat efektivitas penyampaian materi. Dari sisi psikososial, guru menghadapi tekanan emosional akibat hambatan komunikasi dan resistensi dari orang tua siswa yang belum sepenuhnya menerima kondisi anak mereka. Secara keseluruhan, keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah ini sangat bergantung pada bagaimana guru reguler mengelola

keterbatasan sistemik tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan fokus antara siswa reguler dan PDBK di dalam kelas. Berdasarkan kendala yang ditemukan, terdapat beberapa saran strategis untuk meringankan tantangan yang dihadapi guru reguler. Pertama, pihak sekolah disarankan untuk mengupayakan kolaborasi intensif dengan tenaga ahli atau psikolog secara rutin guna mendampingi guru dalam merancang modul ajar yang sesuai, sembari menunggu pengadaan GPK dari pemerintah. Kedua, Dinas Pendidikan diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan pedagogi khusus yang lebih teknis dan berkelanjutan bagi guru kelas agar mereka memiliki kepercayaan diri dalam menangani berbagai karakteristik PDBK. Ketiga, guru disarankan untuk melakukan pendekatan personal yang lebih empatik dan rutin kepada orang tua siswa melalui forum edukasi atau diskusi santai mengenai perkembangan anak, guna membangun kepercayaan dan meminimalisir hambatan komunikasi. Terakhir, pemenuhan fasilitas fisik yang aksesibel harus mulai diprioritaskan oleh pihak manajemen

sekolah secara bertahap guna mendukung kemandirian siswa dan mengurangi beban asistensi manual yang selama ini dilakukan oleh guru kelas. Dengan adanya sinergi antar pihak, diharapkan beban kerja dan tekanan yang dirasakan guru reguler dapat berkurang sehingga kualitas pembelajaran inklusif dapat tercapai secara maksimal.

Madrasah Ibtidaiyah, 02(01), 111-118.

Wulandari, R. (2023). Keterampilan Sosial Anak Autis di Kelas Inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(1), 77-86.

DAFTAR PUSTAKA

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109–124.

Marlina, S., & Susanti, R. (2021). Implementasi Kurikulum Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 16(3), 231-240.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sapon-Shevin, M. (2007). *Widening the circle: The power of inclusive classrooms*. Beacon Press.

Saputro, B., et al. (2021). Pendidikan Inklusif: Antara Harapan dan Realita. *Jurnal Pendidikan Umum*, 9(2), 133-144.

Ummah, R., Safara, N. S. T., Kumilasari, A. R. U., Dimas'udah, H. R & Sukma, V. A. M. (2023). Tantangan Atau Hambatan dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi. *Jurnal*